

BAHASA POLITIK NOVEL KAWI MATIN DI NEGERI ANJING
KARYA ARAFAT NUR

Suci Ayu Latifah, Wahyu Widayati, Ni Nyoman Sarni

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Dr. Soetomo Surabaya

mbaksuci33@gmail.com, wahyuwidayati52@yahoo.com,
ninyoman1405@gmail.com

Abstrak

Penelitian dilakukan untuk menganalisis bahasa politik dalam novel Kawi Matin di Negeri Anjing karya Arafat Nur. Pasalnya, stilistika penceritaan dalam novel banyak membubuhi bahasa-bahasa beraroma politik kemiliteran yang dikemas melalui bentuk kekuasaan. Novel ini bercerita pada masa pemerintahan Orde Baru, tahun perpolitikan pemerintahan Soeharto. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Objek penelitian berupa novel Kawi Matin di Negeri Anjing karya Arafat Nur. Adapun tekniknya, studi pustaka dengan teknik analisis data. Hasil temuan terhadap bahasa politik ditemukan dengan mendeskripsikan kata-kata atau kalimat beraroma politik. Pemakaian bahasa semacam ini ditujukan sebagai kode estetik dalam tindak tutur suatu kelompok sosial berdasarkan mata pencahariannya.

Kata Kunci: bahasa politik, novel, sociolinguistik sastra.

Abstract

The study was conducted to analyze the political language in the novel Kawi Matin in the Dog Country by Arafat Nur. The reason is, the stylistics of storytelling in the novel often embellish the language of military politics that are packaged through the form of power. This novel tells the story of the New Order era, the political year of the Suharto government. The research method uses descriptive qualitative. The object of research is the novel Kawi Matin in the Dog Country by Arafat Nur. As for the technique, literature study with data analysis techniques. The findings on political language are found by describing words or sentences with political scent. The use of this kind of language is intended as an aesthetic code in the speech acts of a social group based on their livelihood.

Keywords: Political Language; Novel; Literary Sociolinguistics.

PENDAHULUAN

Bahasa, sesungguhnya bagian dari khazanah budaya. Bahasa berposisi ‘menceritakan’ sesuatu, sekaligus ‘menunjukkan’ sesuatu. Kebermanfaatan bahasa tak ubahnya media penyampai fakta sosial (*language is a social fact*). Maksudnya, eksistensi suatu bahasa tidak terpisahkan oleh kenyataan sosial wilayah bahasa sekelompok penuturnya. Pemikiran Suwito berpandangan, keberadaan bahasa berwujud pelukisan fenomena sosial. Sedangkan, kedudukannya berhubungan dengan penggunaan bahasa di suatu kelompok masyarakat (1985:2).

Kajian terhadap bahasa dan masyarakat, dijelasterangkan pada studi sociolinguistik. Sebuah kajian yang membicarakan seluk beluk bahasa dan konteks sosial. Sociolinguistik berpandangan, kajian terhadap bahasa mengutip pemikiran Fishman. Suatu kelompok masyarakat atau anggota tertentu yang mengenal bahasa tutur dan norma-norma sesuai penggunaannya (1975:28). Pada ranah ini, penelitian sociolinguistik mencoba mendeskripsikan sistem kebahasaan di ruang lingkup masyarakat.

Eksistensi bahasa menurut Budiyanto, menitikberatkan pada fungsi dan makna sebagai ajang komunikasi (2014:4). Bahasa pula, memiliki kekuatan luar bisa dalam menarasikan, mendeskripsikan, dan lain sebagainya terhadap suatu objek sasaran. Baik karenanya, senantiasa bahasa (tindak tutur) bersifat kontekstual berdasarkan bidang dan ruang lingkupnya. Bahasa politik, sudah barang pasti konteks sosial di ruang lingkup politik. Menurut hemat saya, bahasa politik tersebut seringnya dijumpai

pada kalangan atau anggota masyarakat pemerintahan.

Bahasa politik, mengulik konsensus Widiatmoko (2007:120), memuat masalah-masalah kenegaraan dan pemerintahan. Penggunaan bahasa politik tercermin pada hal-hal berkenaan dengan perpolitikan. Bahasa-bahasa yang dilontarkan, seperti kenegaraan, pemerintahan, kebijakan, kekuasaan, dan lain-lainnya. Kelompok anggota politik versi Usdiyanto (2004:3) berkaitan dengan jenis mata pencaharian maupun kelompok sosial tertentu. Sekelompok tersebut nantinya memiliki kesamaan interest dalam situasi yang menghubungkan dengan kelompok sejenisnya.

Bahasa dalam kelompok politik itu pula bersifat situasional—relatif konstan. Artinya, tidak dipengaruhi oleh perbedaan geografis. Hanya saja, orang-orang yang terlibat di dalamnya cenderung mengembangkan kosakata tertentu (Eliya, 2017:287). Jelasnya, bahasa politik sesungguhnya fenomena pemakaian bahasa (interaksi) dalam satu profesi yang sapadan. Maka, muncul pemahaman secara eksklusif antaranggota dalam memilih situasi tutur (*speech situation*) (Leech, 1993:15).

Kawi Matin di Negeri Anjing merupakan novel bertemakan politik. Novel tersebut terbit tahun 2020 oleh Basabasi, sekaligus menjadi juara II Sayembara Menulis Novel Basabasi. Stilistika penceritaan banyak membubuhi bahasa-bahasa perpolitikan. Seperti obrolan seputaran ketatanegaraan, pemerintahan, kebijakan, bantuan sosial, kekuasaan (hukum), dan lain sebagainya. Kemenonjolan bahasa politik tersebut lantaran novel mengambil latar waktu Orde Baru, pemerintahan Soeharto.

Perwujudan bahasa tersebut disampaikan lewat bahasa dan pengaplikasiannya perantara bahasa pula (Febrianto, dkk, 2020:205).

Novel, representasi sejarah pada zamannya bereskapisme membongkar bagaimana konflik sosial dan permainan politik pemerintahan. Ketika hukum tidak lagi berlaku di kehidupan berkeadilan sosial. Hukum hanya berlaku pada rakyat pinggiran tak berpendidikan. Dengan begitu, sangat menarik bahasa politik dikaji dalam mendedah sistem bahasa dan konteks sosial dalam masyarakat.

Di sini, analisis kajian banyak mendedah persoalan politik lewat stilistika penceritaan pengarang. Rasa-rasanya, novel pemberontak merupakan kajian yang seksi untuk dibahas persoalan politik dan hal-hal yang bekerja di dalamnya. Sementara itu, memang novel-novel Arafat Nur beraroma politik berasa pemberontakan. Suatu katarsis, pelarian pengarang terhadap ingatan sejarah Aceh pada masa hidupnya.

Penelitian terhadap novel pernah dilakukan oleh mahasiswa STKIP PGRI Ponorogo, yaitu Muhammad Arriza Nur Wahid, Sutejo, dan Edy Suprayitno. Penelitian tersebut termuat Jurnal Bahasa dan Sastra 8 (2) Juli 2020, hlm. 92-99. Titik fokus penelitian adalah mendeskripsikan nilai-nilai moral yang terdapat pada objek penelitian. Hasil temuan di antaranya ketabahan, penindasan, tolong-menolong, dan kasih sayang. Selanjutnya, penelitian terhadap novel belum pernah dilakukan selama peneliti melakukan pencarian. Akan tetapi, penelitian berkaitan dengan kajian bahasa dan sosiolinguistik sudah banyak diteliti.

Ixsir Eliya dan Ida Zulaeha, mahasiswa Universitas Negeri Semarang meneliti komunikasi politik Ganjar

Pranowo. Penelitian tersebut termuat di jurnal Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Vol. 6 No.3 tahun 2017. Penelitian berjudul Pola Komunikasi Politik Ganjar Pranowo dalam Pespektif Sosiolinguistik di Media Sosial Instagram. Hasil penelitian ditemukan penggunaan pengkodean tutur sebagai kebutuhan berkomunikasi dan fungsi tuturan. Variasi kode dalam bertutur sangat beragam.

Akhirnya, penelitian terhadap bahasa politik ini menjadi daya sentuh yang lain, yaitu dengan menggunakan objek penelitian berupa novel. Rata-rata analisis bahasa politik di sini kebanyakan mengambil objek seperti pidato kepresidenan, pidato pegawai negeri, dan lain sebagainya. Dengan begitu, semoga penelitian ini dapat memberikan pandangan terhadap pembaca. Apabila novel-novel berlatar pemberontakan, sejarah, dan politik banyak menggunakan pemakaian bahasa beraroma politik (kekuasaan).

METODE

Penelitian Bahasa Politik Novel Kawi Matin Karya Arafat Nur (Kajian Sosiolinguistik Sastra). Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Dikarenakan penelitian kualitatif cenderung beracuan pada suasana yang terkendali atau laboratoris (Agan, 2022). Objek penelitian ini adalah novel Kawi Matin di Negeri Anjing karya Arafat Nur. Novel setebal 172 halaman diterbitkan oleh BASABASI, tahun 2020. Novel tersebut merupakan naskah pemenang Juara II Sayembara Novel Basabasi 2019. Selanjutnya, adapun sumber yang digunakan peneliti adalah dari jurnal, makalah, dan buku-buku yang berkaitan dengan bahasa politik.

Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Teknik analisis data adalah simak, baca, dan catat. Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah dengan membaca objek penelitian secara berskala. Pembacaan objek penelitian bisa dilakukan minimal dua kali pembacaan. Pembacaan kedua atau ketiga disertai dengan memberi tanda atau coret terhadap kata-kata atau kalimat-kalimat sesuai dengan rumusan masalah.

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan reduksi data untuk mengecek kembali data-data untuk analisis. Kemudian, setelah data dipilih dan dipilah, peneliti melakukan analisis dengan dibantu teori yang digunakan. Akhirnya, dari cakupan analisis didapatkan kesimpulan. Kesimpulan dijelaskan dengan singkat, padat, dan rinci untuk menghasilkan simpulan yang memikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti tidak bisa menghindari stilistika penceritaan beraroma politik pada novel pemberontakan, *Kawi Matin di Negeri Anjing* karya Arafat Nur. Keberadaan subjek kreator dalam karya (bahasa) dan konteks sosial bekerja sangat apik, rinci, dan detail mengobrak-abrik kebusukan politik pemerintahan Soeharto. Karenanya, sistem bahasa politik pantas dianalisis untuk mengetahui bagaimana kinerja bahasa dalam konteks sosial.

Berikut merupakan analisis temuan bahasa dan seputaran politik dalam pembacaan novel. Pembacaan terhadap novel mengingatkan fenomena carut-marut kehidupan zaman dulu. Hukum (kekuasaan) tidak lagi berjalan semestinya. Sistem perpolitikan dijadikan tameng. Bukan menjunjung dan mempertahankan politik, melainkan bermain politik di dalamnya (Sartini, 2018:171). Jabatan

menjadi pegawai negeri diangung-angungkan. Semua orang merintih—mencari dan meminta kedudukan sosial.

“Pemerintah pusat sudah menetapkan Aceh sebagai wilayah perang, menyerahkan kekuasaan penuh kepada serdadu...Negara menaunginya dengan payung hukum, dijanjikan ganjaran kenaikan pangkat bagi setiap prajurit yang membunuh pemberontak...”

“Akhirnya, para tentara berlomba-lomba membunuh rakyat...”

(KMNA, 2020:43-44)

Masyarakat Aceh dan orang-orang pemerintahan Jawa bersekutu hebat. Kepresidenan Soeharto mengirimkan bala tentara ke Aceh untuk melakukan pemberontakan atas niat Aceh mendirikan negara baru. Pemerintah memberikan janji kepada anggota tentara, barang siapa yang berhasil melumpuhkan pejuang Aceh—membunuh dipastikan mendapat pangkat sebagai pegawai negeri tanpa perlu membayar. Lebih-lebih, semakin banyak korban semakin tinggi pula pangkatnya.

Sistem politik dan hukum yang amat gila. *Kawi Matin di Negeri Anjing* merupakan novel politik pada masa Orde Baru. Peneliti dapat merasakan, di satu sisi kecemasan pemerintah terhadap pengingkaran masyarakat Aceh. Kesatuan tidak lagi menjadi visi dan misi negara apabila benar, Aceh menjadi wilayah lain. Di sisi lain, sekelompok orang mengidam-idamkan kedudukan sosial. Kepangkatan bermata pencaharian di pemerintahan dijadikan ajang berlomba lewat tindakan ketakmanusiaan menyiksa, membunuh, menembak, bahkan memerkosa para gadis-gadis Aceh.

Bahasa politik dalam kutipan secara langsung dibuktikan lewat

kekuasaan hakiki. Bagaimana pemerintah menurunkan sistem aturan politik yang gila. Alibinya, gerakan pemerintah dalam mencegah problem negara atas terbentuknya negara baru di Indonesia. Sebab, diksi ‘sekutu’ disebutlah oleh pengarang, Aceh merupakan wilayah perang. Sedangkan, diksi ‘serdadu’ tidak lain anggota tentara dari tanah Jawa.

“... Saat kembali ke Jakarta, prajurit yang melenyapkan nyawa itu segera dinaikkan pangkat—sebagaimana janji negara atas jasanya melenyapkan pembangkang.”

(KMNA, 2020:63)

Bahasa politik dalam novel *Kawi Matin* di Negeri Anjing sesuatu permainan politik yang kejam, sadis, bahkan mengerikan. Bahasa politik ini dapat berbentuk verbal maupun non-verbal (Nasution, 1990:3). Siapa saja yang melawan politik, atau mencoba ingkar terhadapnya dipastikan mendapat kesengsaraan luar biasa, seperti masyarakat Aceh dalam novel. Kemudian, masyarakat Dili dalam novel *Jazz, Parfum*, dan *Insiden* karya Seno Gumira Ajidarma.

Sebaliknya, siapa saja yang mampu memanfaatkan jabatan di pemerintahan mendapati kehidupan yang megah dan gemilang. Seperti Kepala Kampung Kareung, Samsul, Gubernur Amani, Leman, dan sekelompok orang (tentara), yang mampu memusnahkan pembangkang negara. Serta, mantan-mantan pejuang Aceh yang diangkat sebagai pegawai negeri. Pembacaan secara pemahaman, kehidupan politik senantiasa meliuk-liuk persoalan jabatan atau pangkat. Permainan politik mengelabui kehidupan sekecil apapun, hingga pada hak kelayakan hidup dan mata pencaharian. Dalam *Kawi Matin*

di Negeri Anjing, kita dapat melihat bersama bagaimana mata pencaharian di pemerintahan dijanji-janjikan untuk mendapati kursi politisasi.

Diksi ‘pangkat’, ‘janji’ identik dengan bahasa-bahasa politisi. Pada kutipan di atas menjadi bukti kekuasaan beraroma politik dari segi mata pencaharian. Selanjutnya, kedudukan atas mata pencaharian pada lingkup pemerintahan sering sekali dijadikan media untuk berkuasa—menguasai segala hal termasuk urusan pidana. Kekuasaan politik-hukum semacam ini terdapat pada stilistika penceritaan novel.

“Syakban sengaja tidak mengadukan kejadian itu kepada polisi karena tidak ada gunanya, selain melelahkan saja. Seperti pengalaman yang sudah, Darwis tidak dipenjara. Kalaupun ditangkap, akhirnya dia akan dilepas. Mengadukannya kepada polisi, hanya membuat polisi semakin kaya.”

(KMNA, 2020:164)

Darwis merupakan anak Kepala Kampung Kareung, Samsul. Tokoh memiliki saudara yang bekerja sebagai polisi dan tentara. Mata pencaharian keduanya dijadikan alat menyelesaikan urusan hukum semudah membalikkan badan. Pada kutipan di atas, mata pencaharian atau profesi dijadikan alat untuk mematikan hukum. Darwis sekalipun melakukan tindakan pidana, ia tidak dihukum. Sekalipun dihukum, tidak akan mendapat ganjaran setimpal. Sistem sogok-menyogok dilakukan oleh Kepala Kampung guna mengelabui hukum.

Karenanya, pada kutipan tokoh Syakban tidak melaporkan kejahatan seksual yang dilakukan Darwis kepada Neung Peung, adik Kawi untuk kedua

kalinya. Sebab, hukum hanyalah aturan tertulis bagi mereka yang kaya dan memiliki status sosial tinggi. Dipertegas pengarang pada kalimat terakhir, bahasa politik mencuat, hanya membuat polisi semakin kaya. Maksudnya, sistem suap bukan lagi suatu asing pada dunia politisasi.

Novel memotret tindakan manusia pada bidang politik dan hukum. Tokoh-tokoh yang berkuasa—memiliki kekuasaan dapatlah membeli hukum dengan mudahnya. Mengutip pandangan Madehang (2020:4), politik hanyalah persoalan kekuasaan. Yakni, bagaimana kekuasaan untuk membuat dan melakukan keputusan, serta menyusun strategi kebijakan-kebijakan tertentu. Sebuah keputusan berdasarkan maksud dan tujuan secara hakiki maupun terselubung.

Hukum tidak berlaku pada masyarakat miskin, seperti Kawi, beberapa mantan pejuang Aceh, dan masyarakat Aceh lainnya. Fenomena ini, direkam Arafat bertokoh utama Kawi, si Pincang. Kawi sempat dipenjara satu setengah tahun karena mencuri lembu milik Leman. Dan, kesalahan yang diada-ada sekelompok orang yang membencinya. Salah satunya, Kepala Kampung desa Kareung dan anaknya si Darwis.

“... Dan, dia menduga, Samsul ikut menyogok polisi, jaksa, dan pengadilan supaya menghukumnya lebih berat.”

“Banyak sekali tuduhan-tuduhan yang memberatkannya, dan semua itu diperkuat oleh pengakuan-pengakuan palsu para saksi, bahwa dia pernah mengancam Kepala Kampung dan anaknya.”

(KMNA, 2020:159)

Bagi orang-orang kaya dan mereka yang memiliki kedudukan sosial, politik dan hukum bisa dibeli dengan uang. Diski ‘menyogok’ bermakna dalam terhadap kejelasan politik uang. Begitu pula dengan pangkat sebagai pegawai negeri. Diski ‘menyogok’ tersebut menjadi bukti adanya sistem politik yang tidak jujur dan adil. Permainan dan bahasa politik dengan mudahnya dibolak-balikkan.

“Hukum bisa dibeli. Asalkan ada uang, apa pun tidak jadi masalah di negeri yang berazaskan keadilan sosial ini.”
(KMNA, 2020:146)

Bahasa politik pada konteks sosial dalam novel Kawi Matin di Negeri Anjing mengandung kesan berkuasa dan menguasai--bertindak sewenang-wenang. Merasa memiliki jabatan (kekuasaan), tokoh Samsul dapat mempermudah segala hal lewat transaksi uang. Hal ini sangat jelas bagaimana sistem politik pada masa Orde Baru bekerja. Mereka berpandangan politik hanyalah soal seberapa uang yang mampu dan bisa dikeluarkan untuk membayar seseorang. Kemauan dengan mudah tercapai asal bisa membeli (jabatan). Begitupula dengan hukuman dapat ringan, bahkan hilang lewat lembaran kertas bernilai rupiah.

Politik semacam itu bukan lagi sebuah kerahasiaan orang-orang yang duduk—menjabat di dunia perpolitikan. Hingga pada saat ini, pemegang kuasa politik masih serupa. Orang berjaya dan kaya bebas saja membeli politik (Sugiarto, 2019:56). Karenanya, bukan hal baru apabila mendengar politikus kita mendapat keringanan hukuman yang tidak wajar. Atau, malah-malah dengan mudah tidak dipenjara karena memilih menebus berupa uang. Atau pun, mereka dipenjara tetapi

mendapat fasilitas yang mewah. Tidur di kasur, ruangan tersendiri, dan mungkin saja fasilitas-fasilitas lainnya.

“Kawi sudah mengira, bukan itu alasan sebenarnya polisi membebaskan Darwis, melainkan ada bukti lain yang membuat mata para polisi terbelalak, lalu membebaskan Darwis dari segala jeratan hukum. Semua tahu—sudah menjadi rahasia umum—banyak sudah orang yang lepas dari tuntutan hukum di Lamhok karena mereka memiliki uang untuk menembus.”

(KMNA, 2020:146)

Lebih mengejutkan, penulis novel Tanah Surga Merah ini dengan baik menunjukkan perilaku orang-orang di bidang politik dan hukum memanfaatkan kursi kekuasaannya. Penggambaran perilaku ini mencomot kehidupan pengarang pada masa dulu. Ketika pengarang novel Percikan Darah di Bunga menjadi seorang wartawan. Mereka (tokoh novel) telah silap (lupa) terhadap peran dan tugasnya di lingkungan masyarakat. Mereka telah dibutakan oleh kekuasaan dan kebijakan yang disebutkan pengarang sebagai payung hukum.

Kawi Matin di Negeri Anjing, sejatinya sebuah novel Arafat Nur sebagai bentuk protes atas ketidaksetaraan dalam hal politik dan hukum. Novel ini sangat amat baik dipenuhi oleh gambaran politik dan hukum, serta konflik sosial yang tidak kunjung usai. Bahkan, persoalan di masa Orde Baru masih juga digandrungi masyarakat kita di tahun 2000-an hingga 2020-an. Bukan sebuah doa, realitasnya permainan cantik semacam itu sudah mendarah daging di masyarakat kita. Boleh saja, korupsi, suap, dan sekelompoknya merupakan tradisi yang

kuat. Akarnya telah menembus batas-batas.

“Kawi mencium semua yang terjadi di balik hukuman berat atas dirinya. Apa yang diduga sebelumnya ternyata benar. Leman, si peternak kaya lembu itu dan Kepala Kampung bermain cantik, bersekongkol dengan polisi, jaksa, dan pengadilan, agar Kawi mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Setahu Kawi, sebagaimana pencuri lembu lain, hanya dijatuhi hukuman tiga bulan penjara, atau paling lama enam bulan penjara.”

(KMNA, 2020:161)

Membaca dengan mamaknai kemudian mengaitkan dengan realitas sosial masa Orde Baru, kutipan di atas merupakan eskapis pengarang. Di sini, sastra berperan refleksi kenyataan sosial pengarang di mana karya itu diciptakan (Sigalingging, 2020:1). Dalam novel, adanya kenyataan akan ketidakgambungan politik-hukum dirasakan Kawi sebagai korban ketidakadilan, sekaligus hasil strategi kinerja politik uang. Kepala Kampung telah menyusun strategi politik dengan mengakali dan membayar polisi, jaksa, dan pengadilan lewat uang. Politik hanyalah milik orang beruang, bukan tidak beruang. Mata dan hati tokoh Samsul dan orang-orang yang bersengkongkol dengannya telah tertutup oleh sifat kematerialistikan. Sesuatu yang bersifat keduniawian.

“Sampai mati pun, aku tidak akan mengeluarkan surat miskin untuknya,” sembur Samsul dengan wajahnya yang merah. “Tidak untuk tahun depan, tidak juga sepuluh tahun akan datang. Biar saja dia dan ibunya mati membusuk di rumah tua buruk itu!”

(KMNA, 2020:147)

Kutipan di atas dilontarkan oleh Samsul, Kepala Kampung yang miskin hati untuk sekadar memperhatikan rakyat-rakyatnya yang miskin. Rakyat yang butuh bantuan dan uluran tangan untuk hidup. Kutipan dialogis di atas secara menohok menunjukkan ketidakseimbangan sebagai pemimpin kampung. Tokoh membiarkan keluarga Kawi dan ibunya kesusahan karena sejatinya yang membuat keadaan semakin parah adalah tokoh Samsul tersebut. Kalimat pertama bermakna sarkasme, dan menunjukkan sebuah paradoks kepemimpinan. Bahasa yang digunakan tidak mengenakan apabila didengar oleh pihak bersangkutan. Tanpa pun perlu ditanyai, bahasa demikian itu jelas yang berbohong, berdusta, jahat adalah tokoh Samsul. Pasalnya tidak mau mengeluarkan surat miskin untuk Kawi dan ibunya. Bahasa sarkasme pada kutipan di atas sebagai wujud kalimat penekanan bilamana dunia politik sedang tidak sehat, sangat kritis, dibutakan oleh kepentingan-kepentingan belaka (Payuyasa, 2019).

Bahkan, amat miskin hati tokoh Samsul pada kutipan di atas mendoakan keburukan menimpa ibu Kawi, kematian. Sesuatu yang paradoks dan ironis kehidupan sosial yang dipenuhi ambisi. Hal itu, juga dilakukan Gubernur Amani, si Gubernur Pasai yang mulanya dipercaya oleh Kawi dan masyarakat kampung Kareung. Nyatanya, begitu berhadapan dengan masa depan lebih baik melalui cara kurang baik, mata dan hatinya gelap. Bantuan sosial dari pemerintah tidak dimanfaatkan untuk menyasar rakyat yang membutuhkan bantuan. Gubernur Amani telah bermuka dua pada Kawi dan beberapa mantan pejuang yang mestinya mendapat bantuan sosial.

“Masalahnya,” lanjut Gubernur Amani, “Dana bantuan yang diberikan pemerintah tidak cukup. Orang-orang Jakarta itu pandai berkilah, dan mereka tidak melakukan sesuai perkataannya. Kau pun tahu, setiap tindakan yang mereka lakukan selalu bertentangan dengan perkataannya. Lain yang mereka katakan, lain yang mereka buat. Itu tabiat, tidak bisa dihilangkan. Namun, sekarang kita sudah terlanjut berdamai.”

(KMNA, 2020:152)

Bahasa politik yang digunakan oleh para politisi, tidak ubahnya bahasa pencitraan (Sartini, 2015:17). Orang-orang yang berada pada urusan pemerintahan, memang terlihat baik di luar. Akan tetapi, kita tidak bisa membaca kedalamannya. Kutipan dialog pada kutipan di atas, bukanlah fakta sebenarnya. Makna bahasa terhadap kenyataan sosial mengandung kebenaran sebaliknya. Sebab itulah, Kawi lewat pengarang menyebutkan tokoh tak ubahnya anjing.

“Dasar Anjing!” maki Kawi geram. “Semua manusia telah menjadi anjing.”
(KMNA, 2020:141).

Justru, tokoh tersebut menyelewengkan dan melakukan penipuan terhadap Kawi dan masyarakat Aceh. Data dan laporan rakyat, termasuk Kawi tidaklah dicatat sebagai pendapat bantuan sosial. Padahal, bagi kehidupan rakyat seperti tokoh Kawi, bantuan sosial sangat dibutuhkan untuk ibunya, tempat tinggal, dan kehidupannya sehari-hari.

“Sebetulnya, ini semua kesalahan Gubernur Amani. Dialah yang tidak mencantumkan namamu sebagai penerima bantuan dari pemerintah.”

(KMNA, 2020:139)

Gubernur Amani tidak lebih baik dibanding Kepala Kampung. Nyata, keduanya bersengkongkol memanfaatkan jabatan atau status sosial. Pada kalangan masyarakat, Kepala Kampung telah bermuka duka. Misalnya menunjukkan wajah memelas saat bertemu rakyat-rakyatnya supaya mendapat kepercayaan masyarakat atas bahasa dan ungkapan politiknya. Mengutip Wilujeng, bahasa politik lebih dalam tidak sekadar mengungkapkan sesuatu. Akan tetapi, menyembunyikan sesuatu (hiding something) (2013:7).

Kutipan di atas merupakan obrolan Kawi dan Bidin. Keduanya adalah mantan penjuang Aceh. Bidin mendapat bantuan dari pemerintah, sedangkan Kawi tidak. Bantuan tersebut merupakan bentuk bantuan karena telah berada pada barisan pejuang Aceh. Peristiwa ini, selepas lengsernya Soeharto. Pemerintah mengeluarkan bantuan bagi masyarakat yang berada pada gerakan pejuang Aceh.

Arafat memotret, kursi (jabatan) bak kutukan yang dengan mudah membuat lupa. Bahkan, tidak peduli terhadap rakyatnya. Karakter ini telah menurun pada orang-orang pemerintahan mantan pejuang Aceh. Sesuatu yang dipikirkan oleh tokoh-tokoh berkuasa dalam novel, hanyalah kemakmuran diri sendiri dan keluarganya.

“Akhirnya, Kawi kembali dengan hatinya yang tambah sakit. Dan, yang membuat hatinya kian terluka, ternyata bantuan tiga rumah untuk Kampung Kaureng dibagikan kepada saudara-saudara Kepala Kampung sendiri. Salah satu dari tiga rumah itu diberikan kepada Darwis, anak Samsul sendiri yang sudah menikah. Namun, dia bukan orang miskin.”

(KMNA, 2020:141)

Kutipan di atas menarasikan usai pertemuan Kawi dengan Kepala Kampung. Pertemuan tersebut bertujuan untuk meminta bantuan penduduk miskin dari pemerintah. Namun, alasan demi alasan dilontarkan Kepala Kampung hingga menyebut-nyebut jatah bantuan tahun itu telah ditetapkan. Bahasa politik semacam itu hanyalah omong kosong belaka. Pasalnya, kenyataan yang ada memang Kepala Kampung tidak akan mengeluarkan dan memberikan bantuan pada Kawi dan keluarganya.

“Sampai mati pun, aku tidak akan mengeluarkan surat miskin untuknya,” sembur Samsul dengan wajahnya yang merah. “Tidak untuk tahun depan, tidak juga sepuluh tahun akan datang. Biar saja dia dan ibunya mati membusuk di rumah tua buruk itu!”

(KMNA, 2020:147)

Bahasa-bahasa politik seolah-olah menguap dalam pembacaan novel. Bahasa beraroma politik sudah menjadi bahasa komunikasi sehari-hari. Peneliti mendapati permainan cantik pemerintah melalui tindakan korupsi. Korupsi, bagi Kasmuri tidak lain mengambil hak yang semestinya diterima oleh orang lain. Korupsi merampas hak ekonomi, sosial hingga budaya masyarakat (2017:169). Atau, sesuatu yang diperuntukan pada kepentingan umum (objek material), tetapi diputar haluan. Seperti yang dilakukan Kepala Kampung dalam kutipan novel.

“Anehnya, Samsul, ayah Darwis, tiba-tiba menjadi orang kaya di tengah-tengah kecambuk perang. Berkat dukungan saudaranya yang polisi dan tentara, dia menjalin hubungan dengan

pemerintah, langsung mendapatkan pekerjaan, berada di antara pejabat-pejabat pemerintah yang hidupnya mewah, dan hanya berpura-pura susah saat berhadapan dengan rakyat jelata. Kabarnya, dia terlibat pada sejumlah proyek pemerintah...”

“Tak ada proyek bangunan yang benar-benar mereka kerjakan, sedangkan uang anggaran terus bertambah, dihabiskan...”

(KMNA, 2020:87)

Pertanyaannya adalah, di mana larinya anggaran proyek bangunan? Adalah pada kantong orang-orang yang silau rupiah. Jawaban ini sejatinya telah terjawab pada kalimat pertama pada kutipan. Sebagaimana peneliti katakan sebelumnya, kesempatan atas status sosial diperalat untuk kepentingan diri sendiri. Bahasa politik tidak lagi mementingkan kebenaran. Kebenaran dalam berpolitisasi kebanyakan menyembunyikan kebenaran. Meskipun, kebenaran sejatinya bersifat relatif tergantung pada interpretasi makna. Serta, kebenaran kebahasaan yang dituturkan (Ardhan, 2020:28).

Politik dan bahasa dijadikan media mengejar kepentingan individual. Atau, bahasa sederhananya, bahasa politisi direncanakan dan disusun sesuai struktur dan hati-hati terhadap kepentingan perorangan. Stilistika penceritaan berbahasa politik pada kutipan di atas menuntun pada tindakan sekelompok manusia melakukan tindakan korupsi. Tindakan semacam ini, peneliti sebut sebagai politik kotor. Artinya, kekuasaan dijadikan kesempatan untuk berkuasa dan menguasai tanpa memikirkan efek atau dampak ke depannya. Tindakan ini bisa dikatakan paradoks politik.

Karenanya, novel *Kawi Matin di Negeri Anjing* adalah sebuah karya sastra yang bernilai baik. Meski yang diceritakan dan ditunjukkan sesuatu yang bernilai minus atau buruk, tetapi pengarang lewat karya ini hendak membawa perubahan. Pengarang membawa pencerahan bagi pembaca-pembacanya. Asumsi Wijakangka, keadaan sosial pada suatu masa terpotret dalam karya sastra (2008:189)

“Kawi tahu, Dun Mimi sangat membenci pemimpin-pemimpin pejuang yang sekarang sedang tenggelam dalam kekayaan dan kemewahan, mengabaikan kepentingan para pejuang kelas bawah, dan tidak peduli pada kesengsaraan rakyat jelata. Uang bantuan itu, kebanyakan dikeruk untuk dirinya, selebihnya dibagi-bagi kepada orang-orang terdekat.” (KMNA, 2020:168)

Bahasa politik dalam kutipan mengandung pemaknaan bilamana kekuasaan tidak digunakan sebagaimana peran dan fungsinya. Pemimpin yang dipilih rakyat telah ingkar dan abai akan janji-janjinya. Kekuasaan dijadikan kendaraan yang bertujuan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Gubernur, kepala kampung, dan para pemimpin pejuang menjadikan kesempatan bergabung menjadi pegawai untuk meniupkan balon dalam perut-perutnya.

Tidak saja orang-orang di tingkat Gubernur, perpolitikan dilahirkan oleh orang-orang yang ada di pemerintahan pusat. Sistem politik yang diberdayakan adalah lewat janji-janji. Di balik itu ada rencana besar yang telah mereka susun untuk berkuasa dan menguasai rakyat kelas bawah. “... Kita tidak bisa membiarkan para penjajah itu menginjak-

injak kepala kita sesuka hati. Kita harus mengusirnya. Apa hak mereka menguasai kita? Merampas semua yang kita miliki. Lalu mereka menistanya. Sungguh biadab!”

(KMNA, 2020:110-111)

Bahasa politik juga berkuasa di bidang ekonomi. Sebagaimana sudah dijadikan pembahasan di atas, kali ini ekonomi dilakukan oleh pemerintah pusat dengan merambas kekayaan alam masyarakat. Kehidupan masyarakat sudah keruntang pungkang ditambah diberdaya hasil alamnya. Suatu gambaran politik yang buta. Mereka berpolitisi tidak memikirkan orang lain (korban). Mereka bertindak dengan memanjakan kepuasan nafsu tanpa control dan kendali. Ini dan itulah politik tanah air sesungguhnya. Lewat novel *Kawi Matin di Negeri Anjing* semakin tampaknya penyakit dunia politik dan hukum Indonesia.

Tindakan yang dilakukan tokoh di atas, pemerintahan dan jabatan yang dimiliki dijadikan kedok demi kepentingan pribadi (Kasmuri, 2017:170). Jeremy Pope beranggapan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi salah satu bentuk tindakan korupsi. Pasalnya korupsi bida atang saat adanya kesempatan dan keinginan (opportunity and willingness) secara bersamaan. Keinginan itu sendiri bisa bersifat internal, juga pengaruh faktor eksternal. Sementara, faktor eksternal lebih cenderung pada kesempatan atau peluang.

Politik, seolah menjadi bisnis kekinian. Politisasi tersebut juga terhirup pada bidang kesehatan lewat pemikiran tokoh Saudah. Tokoh memandang orang-orang yang bekerja di rumah sakit menjadikan kesempatan untuk mendapat uang dari orang-orang yang sakit.

“...pandangan Saudah, rumah sakit adalah tempat usaha orang-orang kaya untuk mendapatkan banyak uang dari orang yang sakit. Mereka tidak akan peduli, tidak mau tahu yang sakit itu kaya atau miskin...”

(KMNA, 2020:58-59)

Di atas merupakan analisis temuan-temuan data pada novel *Kawi Matin di Negeri Anjing* beraroma bahasa politik. Suatu bahasa politik terhadap tindak tutur masyarakat pemerintahan yang mengandung politisasi. Kedudukan atau status sosial dijadikan kesempatan para tokoh-tokoh di dalamnya. Mereka bermain-main kursi guna kepentingan diri sendiri. Fenomena semacam ini secara gamblang dilukiskan dan dipotret Arafat lewat style paradoks dan ironi di bidang politik, hukum, dan sosial.

Akhirnya, bahasa politik dalam novel *Kawi Matin di Negeri Anjing*, sungguh suatu potret masa lalu yang membudaya hingga hari ini. Fenomena kini, bahasa politik meruang ke dalam bidang-bidang kehidupan lainnya. Karenanya, perlahan dapat dikenali bagaimana kerja politik menguasai segala lini kehidupan terkecil. Sungguh memprihatinkan. Ingat, bahasa politik memang sering sekali dikemas dalam ungkapan tipuan.

Akan tetapi, akronim yang tidak terlalu dikenal atau akronim buatan penulis perlu diberi keterangan kepanjangannya. Sebagai contoh: Model pembelajaran SMT (Strategi Menulis Terbimbing) sebagai upaya peningkatan kreativitas bersastra siswa SMA.

PENUTUP

KESIMPULAN

Bahasa politik, sesungguhnya ungkapan yang sering sekali dikaitkan dengan persoalan ketatanegaraan, pemerintahan, kebijakan, dan lain sebagainya. Bahasa politik itu pula, memuat janji-janji atas rencana atau strategi mempertahankan kekuasaan. Kursi jabatan dijadikan label terhadap kedudukan di mata pencaharian dan kelompok sosial. Novel *Kawi Matin* di Negeri Anjing karya Arafat Nur, bahasa politik telah menjadi bagian dari bentuk komunikasi sehari-hari. Pasalnya, novel mengangkat tema sistem politik pada masa pemerintahan Soeharto. Bahasa-bahasa politik tersebut hidup dalam segala hal sesuatu dengan kepentingan-kepentingan tertentu.

Dalam novel, politisasi mencuat pada persoalan kebijakan pemerintahan, misalnya berkaitan dengan penerimaan bantuan sosial. Kemudian, sistem pengangkatan menjadi pegawai negeri lewat tindakan tidak berperikemanusiaan, seperti membunuh para pejuang Aceh. Mereka adalah orang-orang yang memiliki niat dan kesepakatan politik membuat negara baru di Indonesia. Oleh karena itulah, banyak bahasa politik dengan permainan politik. Kebenaran bukan lagi jaminan terhadap sesuatu yang dibubuhi persoalan kepentingan diri sendiri. Sebab, bahasa politik senantiasa dibatasi oleh gagasan-gagasan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Agan, S., Puspitoningrum, E. 2021. *Kosa Kata Bahasa Asing dalam Bahasa Indonesia Ragam Jurnalistik*. Wacana: Jurnanal Bahsa, Sastra, dan

Pengajaranya. Volume 5, Nomor 2, hlm 63 – 76.

Ardhan, Dhea Tesane. 2020. *Analisis Bahasa Politik Anies Baswedan Dalam Pidato Pengukuhannya Sebagai Gubernur Jakarta Periode 2017-2022*. *Jurnal Etnolingual* Vol 4 No 1 Mei, 2020, 27-42.

Budiyanto, Dwi. 2014. *Aspek Persuasif dalam Bahasa Iklan Partai Politik*. *Jurnal Litera* Vol. 13 No.1, April 2014.

Eliya, Ixsir dan Ida Zulaeha. 2017. *Pola Komunikasi Politik Ganjar Pranowo dalam Pespektif Sociolinguistik di Media Sosial Instagram*. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 6 No. 3, 2017.

Febrianto Diki, dkk. 2020. *Hegemoni Kekuasaan dalam Novel Koplak Karya Oka Rusmini: Kajian Sosiologi Sastra*. *KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, Vol. 3 No. 2, April 2020.

Fishman, J.A. 1975. *Sociolinguistics: A Brief Introduction*. Msachusetts: Nembury House Publisher.

Kasmuri. 2017. *Representasi Korupsi dalam Novel-Novel Indonesia Era Reformasi*. *HUMANIS*, VOL. 9 No. 2, Juli 2017.

Leech, Geoffrey. 1993. *The Principles of Pragmatics*. New York: Longman.

Madehang. 2018. *Politik Bahasa, Bahasa Politik*. *Jurnal Bahasa Nusantara*.

Nasution. 1990. *Suatu Pengantar Komunikasi Politik*. Makalah.

Nur, Arafat. 2020. *Kawi Matin di Negeri Anjing*. Yogyakarta: Basabasi.

- Payuyasa, I Nyoman. 2019. *Potret Indonesia dalam Novel Sirkus Pohon Karya Andrea Hirata: Sebuah Kajian Sosiologi Sastra*. Sirok Bastra, Vol 7, No 1 2019. <https://sirokbastra.kemdikbud.go.id/index.php/sirokbastra/article/view/157>
- Sartini, Ni Wayan. 2015. *Bahasa dan Pencitraan: Strategi Kebahasaan dalam Wacana Politik*. Jurnal Tuter Volume 1 Nomor 2, Agustus 2015.
- Sigalingging, Hendra. 2020. *Politik Identitas Etnis Batak Toba dalam Novel Bulan Lebam di Tepian Toba Karya Sihar Ramses Simatupang*. Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 7 (1) Januari 2020.
- Sugiarto, Agus Syaiputra. 2019. *Persaingan Politik dalam Novel Nyali Karya Putu Wijaya*. Prosiding SENASBASA, VOL. 3 No.2 2019 hlm 53-59.
- Suwito. 1985. *Sosiolinguistik: Pengantar Awal*. Surakarta: Henary Offset.
- Widiatmoko, Bambang. 2007. *Analisis Bahasa Politik Pejabat Publik Indonesia Berdasarkan Tinjauan Filsafat Nilai*. Jurnal Ilmu Pengetahuan, Agama dan Budaya.
- Wijakangka, A. R. 2008. *Analisis Hegemoni Kekuasaan dalam Novel Pabrik Karya Putu Wijaya*. Jurnal Artikulasi, 5 (1), 187–213.
- Wilujeng, Sri Rahayu. 2013. *Bahasa Politik dalam Perspektif Filsafat Bahasa Ludwig Wittgenstein*. Makalah.